

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara kepulauan dan desa merupakan salah satu unsur teritorial terkecil dari negara manapun, khususnya Indonesia. Karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan, maka fokus utama pemerintah adalah pada pembangunan. Desa diberi kesempatan yang unik untuk melakukan praktik pengelolaan dan pembangunan sendiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan dan mengubah cara pandang pembangunan bahwa kesejahteraan dan pembangunan ekonomi tidak harus di kota-kota besar, tetapi di daerah-daerah di Indonesia. Karena desa adalah bagian dari masyarakat maka desa menjadi garda terdepan dalam upaya gerakan pembangunan, lahir dari prakarsa masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, dan pembangunan harus dipimpin oleh desa karena berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Program Pembangunan Nasional “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk itu, pemerintah desa diharapkan

lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan berbagai sumber daya alam, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.

Berdasarkan (“Undang-Undang No. 6,” 2014) diatur bahwa pengelolaan keuangan pemerintah desa dipisahkan dari keuangan pemerintah daerah. Desa meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan insentif kabupaten/kota setempat, sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, dukungan keuangan, dan APBD kabupaten/kota, dan non- mengikat sumbangan dan sumbangan dari pihak ketiga. Tentu saja, dengan peran besar yang dimainkan desa, ada tanggung jawab yang besar pula.

Berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga 2018, kasus *fraud* dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana tercatat sedikitnya ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar (Kompas,2018). Korupsi tidak terlepas dari campur tangan aparat desa dalam pengelolaan dana desa, pembukuan, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran. Kurangnya pengawasan dari pemerintah serta sistem akuntansi yang kurang baik mengakibatkan terjadinya *fraud*. Oleh sebab itu, Pemerintah harus mengawasi pengelolaan keuangan untuk membangun pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

Salah satu upaya pemerintah adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meminimalisir penyelewengan dana desa, pemerintah harus merancang sistem pengawasan anggaran dana desa yang efektif. Dasar sistem pengawasan tersebut

antara lain Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan (“Permendagri Nomor 113,” 2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahun 2015 atas dasar aturan tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) bertujuan untuk mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Sebelum SISKEUDES, sebagian besar desa menggunakan aplikasi format non-standar seperti MS-Excel untuk menyiapkan anggaran, rekening, dan laporan keuangan. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Selain itu, sementara SISKEUDES menstandarisasi format data dan pelaporan, ada ratusan desa yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standar hukum menggunakan aplikasi yang dibeli dari pengembang swasta. SISKEUDES menjadi alternative yang baik agar *Good Village Governance* terlaksana (BPKP,2019).

Penggunaan sistem teknologi informasi menjadi sangat penting mengingat pemerintah desa saat itu menguasai jumlah uang yang sangat besar. SISKEUDES merupakan bentuk pembenahan pemerintah untuk menjadikan pengelolaan pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa lebih efektif, efisien dan transparan. Tujuan dikembangkannya aplikasi SISKEUDES adalah untuk membantu aparat pemerintah desa dalam membuat regulasi APBDes lebih transparan dan akuntabel. Melalui aplikasi SISKEUDES diharapkan aparat pemerintah desa dapat mengurangi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dana desa dan meningkatkan kinerja aparatur desa. Sampai dengan tahun 2018, tingkat implementasi SISKEUDES versi

1.0 telah digunakan di 70.094 desa, atau 93,51% dari total 74.957 desa di Indonesia. Terkait pelaksanaan SISKEUDES, kesiapan APBDes nasional saat ini 93,57% dan pengelolaan keuangan desa 80,69%. Perkembangan terbaru memperkenalkan SISKEUDES online di 78 kotamadya. Pada tahun 2019, jumlah desa yang menggunakan SISKEUDES di Bali sebanyak 636 desa. Hal ini menunjukkan bahwa semua desa di Bali telah memperkenalkan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desanya. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Bali yang memiliki 5 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 41 Desa yang sudah menggunakan Siskeudes.

**Tabel 1.1**  
**Desa Pengguna Siskeudes di Provinsi Bali**

No	Nama Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Pengguna Siskeudes
1	Kota Denpasar	27	27
2	Badung	46	46
3	Jembrana	41	41
4	Buleleng	129	129
5	Gianyar	64	64
6	Bangli	68	68
7	Karangasem	75	75
8	Kelungkung	53	53
9	Tabanan	133	133
<b>Jumlah</b>		<b>636</b>	<b>636</b>

Sumber: Laporan BKP tahun 2019

Berdasarkan Surat edaran menteri dalam negeri tahun 2015 Nomer 900/6271/5j dan MOU-16/K/D4/2015 tentang pengelolaan dana desa pada poin tiga dijelaskan bahwa aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan dana desa wajib digunakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia, dan Pemprov Bali juga menindaklanjuti surat edaran tersebut. Sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Komisioner Ketut Kariadi Erawan menyebutkan, aplikasi pembiayaan desa yang dikembangkan BPKP sejauh ini sudah diterapkan di 41 desa di Provinsi Jembrana. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan penggunaan aplikasi berbasis online bekerja sama dinas pemberdayaan masyarakat desa serta dinas komunikasi dan informatika kabupaten dan perangkat desa, untuk mencapai praktik pengelolaan keuangan yang transparan, efektif dan akuntabel. Namun dilihat dari kondisi SDM desa yang belum memadai, pelaksanaan dan penerapan sistem keuangan desa cukup mengkhawatirkan. Selain itu, desa yang belum memiliki prosedur dan fasilitas prasarana dalam pengelolaan keuangan merupakan tantangan dalam mengimplementasikan sistem keuangan tersebut (Sumber: [Http://App.Bpkp.Go.Id:9090/Esakip/Assets/Dist/Dok/LK\\_PW22\\_2019.Pdf](http://App.Bpkp.Go.Id:9090/Esakip/Assets/Dist/Dok/LK_PW22_2019.Pdf), 2019).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Achmad Hafisz Tohir, selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyatakan bahwa pelaporan SISKEUDES di Provinsi Bali beberapa kendala telah diidentifikasi yang menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan laporan keuangan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa sistem laporan harus dibuat semudah mungkin supaya tidak mempersulit proses pelaporan ([dpr.go.id](http://dpr.go.id)).

Hal ini sebanding dengan hasil observasi dan wawancara peneliti di beberapa desa di Kabupaten Jembrana tentang penggunaan Siskeudes terdapat beberapa desa seperti Desa Berambang, Desa Pengambengan, Desa Tukadaya yang belum optimal dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES yang disebabkan: Pertama, tidak semua aparat desa dapat mengoperasikan aplikasi SISKEUDES, salah satunya desa Brambang, mengeluhkan kendala dalam pengoprasian SISKEUDES yaitu kurangnya pemahaman aparatu desa dalam mengoprasikan SISKEUDES dikarenakan minimnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota juga kecamatan kepada pemerintah desa, Kedua kurangnya tenaga sumber daya manusia, seperti halnya di desa pengambengan yang menjadi operator sistem bukanlah operator khusus melainkan sekertaris desa yang pekerjaannya merangkap sebagai operator sistem. Ketiga, kurangnya kesiapan pengguna teknologi dalam mengoprasikan Siskeudes menyebabkan proses penginputan data pelaporan keuangan desa menjadi terhambat salah satu desa seperti banyubiru mengeluhkan sering terjadinya keterlambatan penginputan data dikarenakan pada saat proses penginputan aplikasi seringkali error sehingga operator harus menginput ulang data, tidak hanya itu operator juga sering mengemukakan sering dilakukannya Update, SISKEUDES sudah melakukan tiga kali pembaharuan versi 1.0 ke versi 2.0.3 yang baru di resmikan pada bulan November 2020. Selain itu jangka waktu yang kurang dalam proses penginputan laporan, pemerintah pusat sering kali memberikan arahan secara dadakan mengenai perubahan kebijakan penyusunan laporan sehingga dari desa belum adanya kesiapan, hal tersebut mengakibatkan kurang efisiensi dan efektifnya kinerja dari operator. Keempat,

beberapa kendala teknis yang terjadi pada proses penggunaan aplikasi yaitu, kurang stabilnya koneksi internet di kantor desa menyebabkan sering terjadinya error atau kegagalan pada proses upload ke sistem sehingga dilakukan proses penguplodan ulang. Hal tersebut dapat menghambat serta memperlambat pekerjaan operator dalam proses penginputan data dikarenakan sistem yang tergantung pada stabil atau tidaknya koneksi internet, dan saat data dicetak tulisan pada data tertumpuk.

Dalam proses Implementasi teknologi informasi tidak selalu mencapai keberhasilan dan tidak sedikit dari sebagian proyek implementasi teknologi mengalami kegagalan, baik secara total maupun sebagian. Meskipun beberapa kegagalan disebabkan oleh lemahnya manajemen dan ada beberapa faktor lain yang cukup berperan besar untuk menentukan kegagalan atau keberhasilan implementasi teknologi informasi. Salah satunya adalah persepsi individu dari penggunaan teknologi pada suatu organisasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi didefinisikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra. Kehadiran suatu teknologi akan dipersepsikan secara berbeda oleh seseorang. Menurut (Davis, 1989) perilaku menggunakan teknologi informasi diawali dengan adanya persepsi mengenai manfaat (*Usefulness*) dan persepsi kemudahan menggunakan teknologi informasi (*Ease Of Use*). Dengan demikian, tanggapan dan persepsi pengguna teknologi informasi akan berpengaruh dalam

penerimaan pengguna teknologi yang dikenal sebagai *Teory Acceptance Model* (TAM).

*Teory Acceptance Model* (TAM) merupakan model yang mengaitkan antara keyakinan kognitif dengan sikap dan perilaku individual terhadap penerimaan teknologi. TAM digunakan untuk menerangkan perilaku penerima individu terhadap teknologi informasi yang menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pengguna adalah penentu utama penggunaan teknologi. TAM mengadopsi rantai sebab akibat dari keyakinan, sikap, minat, dan perilaku. Berdasarkan keyakinan tertentu seseorang membentuk sikap terhadap suatu objek atas dasar minat untuk berperilaku terhadap suatu objek. TAM merupakan sebuah konsep yang dianggap paling baik dalam menjelaskan perilaku pengguna (*User*) terhadap sistem teknologi informasi baru dan bagaimana pengguna menerima sebuah sistem.

Menurut (Abdillah, 2015a), TAM memiliki lima konstruksi yaitu 1) persepsi kemudahan penggunaan, 2) persepsi kegunaan, 3) sikap terhadap pengguna teknologi, 4) minat perilaku menggunakan teknologi, 5) pengguna teknologi sesungguhnya. Persepsi kemudahaan penggunaan (*Perceived Ease Of Use*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Sedangkan persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi dapat meningkatkan kinerjanya. Sikap terhadap penggunaan teknologi (*Attitude Toward Using Technology*) didefinisikan sebagai evaluasi dari pemakai tentang ketertarikan dalam menggunakan teknologi. Sedangkan minat perilaku menggunakan teknologi

(*Behavior Intention To Use*) didefinisikan sebagai minat (keinginan) seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Selanjutnya penggunaan teknologi sesungguhnya (*Actual Use*) dapat diukur melalui kepuasan pengguna serta jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan teknologi atau frekuensi penggunaan teknologi tersebut. TAM diharapkan mampu menjelaskan perilaku pengguna dalam rentang yang lebar pada pengguna akhir dan populasi pengguna.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi pengguna dalam penggunaan dan penerimaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di pemerintah desa Kabupaten Jember dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). Dengan diketahuinya persepsi aparat desa terhadap penggunaan siskeudes maka akan memudahkan pihak pemerintah pusat/kabupaten untuk melakukan proses perbaikan, pengembangan, pelatihan dan sosialisasi dalam penggunaan SISKEUDES. Berdasarkan latar belakang pentingnya penelitian ini dilakukan mengingat SISKEUDES merupakan suatu teknologi terbaru yang dikembangkan untuk membantu proses pengelola keuangan desa dan penggunaannya wajib. Sehingga perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut tentang sejauhmana pengguna dapat memahami dan penerimaan teknologi tersebut, agar SISKEUDES dapat diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah desa. Menurut Nasir (2018), menyatakan bahwa penerimaan pengguna atau *user* merupakan keberhasilan implementasi suatu teknologi.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dimotivasi oleh beberapa hal. Pertama, pengimplementasian

Siskeudes telah dilakukan merata diseluruh desa di Indonesia yang memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan desa, namun ternyata masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pengimplementasian Siskeudes. Kedua, dengan dijadikannya Siskeudes sebagai aplikasi keuangan yang wajib digunakan oleh seluruh desa di Indonesia, maka kebutuhan penggunaan meningkat sehingga kebutuhan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut juga meningkat. Selain itu sepengetahuan peneliti penelitian terkait dengan penerimaan teknologi system keuangan desa masih terbatas. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dari penelian ini yaitu :

Peneliti pertama, meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Melalui Pendekatan Model TAM dan TPB”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut, baik TAM maupun TPB menjelaskan faktor yang mampu mempengaruhi penggunaan aplikasi SISKEUDES dengan baik (Salisa,dkk, 2019). Kelemahan dalam penelitian ini meskipun menggunakan dua model pendekatan tapi tidak ada perbedaan yang signifikan dan lebih kearah membandingkan kedua model pendekatan.

Peneliti kedua, meneliti tentang “Analisis Penerimaan Aplikasi SISKEUDES Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dengan *Teori Acceptance Model* (TAM) menunjukkan bahwa *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* menjadi tolak ukur aparatur desa untuk menerima suatu aplikasi (Lusiono, 2017). Kelemahan dalam penelitian ini peneliti hanya

menggunakan dua konstruk sebagai variabel yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* sehingga belum dapat dijadikan sebagai tolak ukur secara menyeluruh terkait penerimaan terhadap suatu implementasi teknologi.

Penelitian ketiga, meneliti tentang “Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Pemerintah Gampong Balang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Naga Raya”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tersebut masih terdapat kendala-kendala yang sering ditemukan dilapangan adalah seperti minimnya pengetahuan dan pemahaman SDM aparatur Gampong khususnya Operator dan Bendahara Desa (KAUR Keuangan) dalam bidang teknologi (Trisna, 2019). Kelemahan dalam penelitian ini yaitu tidak dijelaskanya bagaimana penerimaan terhadap penggunaan Siskeudes. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang membedakan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini memfokuskan pada pendekatan dengan model TAM (*Teori Acceptance Model*) dengan menggunakan 5 konstruk utama TAM sehingga dapat menggambarkan dengan jelas penerimaan teknologi pada aplikasi siskeudes, agar pihak terkait khususnya pemerintah pusat/daerah dapat menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur dalam penggunaan aplikasi dimasa yang akan datang maka dapat membantu pemerintah pusat maupun daerah tentang optimalisasi penggunaan sistem dan pengelolaan Keuangan Desa. Mengacu pada latar belakang tersebut peneliti tertatik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH FAKTOR *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL* (TAM) TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA**

**(Studi kasus di Kabupaten Jemberana)”. Dengan mengetahui pengaruh faktor-faktor *Technology Acceptance Model* terhadap penggunaan aplikasi SISKEUDES dapat meningkatkan kinerja aparatur desa, memudahkan dalam melakukan pelaporan sehingga pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan lebih efektif dan akuntabilitas.**

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun identifikasi masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia (Aparatur) dalam menjalankan sistem keuangan desa
2. Kurangnya pembinaan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota,
3. Adanya beberapa kendala yang terjadi pada penggunaan aplikasi sistem keuangan desa.
4. Kurang efektifnya dan efisien kinerja aparatur desa dalam proses pelaporan keuangan desa di kabupaten Jemberana menyebabkan terlambatnya proses pelaporan.

## **1.3 BATASAN MASALAH**

Pada penelitian ini, peneliti dapat memfokuskan untuk meneliti hal-hal yang mempengaruhi pengaruh faktor-faktor *Technology Acceptance Model* terhadap penggunaan aplikasi (SISKEUDES). Objek yang digunakan adalah bendahara atau

aparatur desa yang menjadi operator aplikasi SISKEUDES di lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Jembrana-Bali. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan lima konstruk yang diambil dari TAM yaitu Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*), Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*), sikap menggunakan teknologi (*Attitude Towards Using Tecnologi*), Minat Prilaku menggunakan teknologi (*Behavioral Intention Of Use*) dan Penggunaan Teknologi sesungguhnya (*Actual Tecnology Use*).

#### **1.4 RUMUSAN MASALAH**

2. Apakah Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) berpengaruh terhadap Sikap Menggunakan Teknologi (*Attitude Towards Using Tecnologi*) dalam penggunaan SISKEUDES ?
3. Apakah Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) berpengaruh terhadap Sikap Menggunakan Teknologi (*Attitude Towards Using Tecnologi*) dalam penggunaan SISKEUDES ?
4. Apakah Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Sikap Menggunakan Teknologi (*Attitude Towards Using Tecnologi*) berpengaruh terhadap Minat Perilaku Menggunakan Teknologi (*Behavioral Intention Of Use*) dalam penggunaan SISKEUDES ?
5. Apakah Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*), Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Minat Perilaku Menggunakan Teknologi (*Behavioral Intention Of Use*) berpengaruh terhadap Pengguna Teknologi Sesungguhnya (*Actual Tecnology Use*) dalam penggunaan SISKEUDES ?

#### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Persepsi Kemudahan (PEU) berpengaruh terhadap Sikap Menggunakan Teknologi (ATUT) ) dalam penggunaan SISKEUDES
2. Untuk mengetahui Persepsi Kegunaan (PU) berpengaruh terhadap Sikap Menggunakan Teknologi (ATUT) ) dalam penggunaan SISKEUDES
3. Untuk mengetahui Persepsi Kegunaan (PU) dan Sikap Menggunakan Teknologi (ATUT) berpengaruh terhadap Minat Perilaku Menggunakan Teknologi (BIU) dalam penggunaan SISKEUDES
4. Untuk mengetahui Persepsi Kemudahan (PEU), Persepsi Kegunaan (PU) dan Minat Perilaku Menggunakan Teknologi (BIU) berpengaruh terhadap Pengguna Teknologi Sesungguhnya (ATU) dalam penggunaan SISKEUDES.

#### **1.6 MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan tambahan pengetahuan terkait efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diadopsi pemerintah. Sehingga dapat menambah pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti dan sebagai bahan bacaan untuk literatur bagi yang tertarik di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

- (a) Apartur Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat desa dalam penerapan aplikasi SISKEUDES, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi.

b) Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya, serta menambah kepustakaan.

c) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai penerapan dan penggunaan aplikasi SISKEUDES.

